

ANALISIS DISPARITAS PREKONOMIAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

VIONITA

Pan Budi Marwoto

Nelly Astuti

Management Program

STIE IBK Bangka Belitung

Pangkalpinang, Indonesia

e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract - This research was conducted by using an Tipology Klassen Method, Entrophy Method, dan Williamson Method. This research was conducted from March 2019 through June 2019 and It consist of 156 page without any the attachments. The research was conducted by using economic growth, economic contribution, dan gross domestic regional bruto. The Purpose of this research is to show comparison economic growth, economic contribution and the comparison of the absolut inter-provincial as well as provide clear information and certainty about the disparity that occurred in Indonesia by the method of Klassen Tipology, Entrophy and Williamson. The result of the analysis show economic growth on the Sumatera island 44,13%, Jawa island 33,19%, Nusa Tenggara island 10,87%, Kalimantan island 26,93%, Sulawesi island 6,04%, Maluku island 0,52% and Papua island 1,91%. Economic contribution on the Sumatera island 22,02%, Jawa island 58,52%, Nusa Tenggara island 3,12%, Kalimantan island 7,86%, Sulawesi island 6,04%, Maluku island 0,52% and Papua island 1,91%. The comparison of the absolut inter-provincial show (the province of the West Sumatera, jambi, and Riau Island: quadran 3 through quadran 4), (the province of the South Sumatera: quadran 4 through quadran 2), (the province of the East Jawa: quadran 1 through 4), (the province of the Banten: quadran 1 through quadran 2), (the province of the Central Sulawesi and North Maluku: quadran 4 through quadran 3), and (the province of the South Sulawesi: quadran 3 through quadran 2).

The result of the analysis the disparity was conducted by using Williamson method show disparity in indonesia is still very high of 0,7503 and Entrophy method show disparity in indonesia of 0,81 and tend to be no movement.

Keywords: Economic Disparity, the Method of Williamson and Entrophy, Economic Growth, Economic Contribution, the Comparison of the Absolut Inter-Provincial.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdaulat, adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdirinya sebuah negara terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Adanya hubungan yang harmonis antara rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat akan menciptakan suatu negara yang kuat dan memiliki solidaritas yang tinggi. Namun pada kenyataannya, di Indonesia kesejahteraan belum dapat dirasakan oleh semua orang.

Pembangunan di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik yang berbeda-beda antar wilayahnya. Keberagaman tersebut berpotensi pada pembangunan antar wilayah yang berakibat pada tidak meratanya hasil pembangunan daerah. Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila merupakan perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar, acuan dan tujuan. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan, serta kehendak seluruh bangsa Indonesia untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin termasuk rasa tentram, rasa aman, dan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia

dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur belum juga tercapai serta mengurangi/menghapuskan kesenjangan yang ada menjadi masalah utama dalam pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Kesenjangan pembangunan yang tidak merata di berbagai wilayah pada dasarnya disebabkan karena antar wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda, letak geografis, kualitas sumber daya manusia dan politiknya. Akibat dari kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses pembangunan suatu wilayah yang juga berbeda.

Memanfaatkan sumberdaya yang ada merupakan salah satu kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Salah satu indikator kualitas pertumbuhan yaitu *Growth with Equity* atau pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan *Growth with Quality* atau pertumbuhan dengan kualitas.

Indonesia dalam tahapan awal pembangunan ekonomi nasionalnya menganut teori yang di kemukakan oleh Hirschman yaitu *Trickle Down Effect* dengan sistem pembangunannya yaitu pembangunan ekonomi di Indonesia hanya akan dipusatkan pada pulau Jawa dengan harapan hasil pembangunan tersebut dapat menetes kebawah dan bisa dinikmati oleh wilayah-wilayah di luar pulau Jawa. Akan tetapi teori yang dikemukakan oleh Hirschman ini ternyata belum mampu membawa perekonomian Indonesia kearah yang diinginkan. Mashab *Trickle Down Effect* yang digeluti oleh pemerintahan pada masa orde baru belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan, akhirnya memunculkan teori baru yaitu *Backwash Effect* yang menggambarkan pendapatan dari hasil sumberdaya yang disalurkan oleh wilayah diluar pulau Jawa hanya terfokus untuk pembangunan di pulau Jawa saja.

Pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia diharapkan tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dapat juga dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. *Growth with Equity* atau Pertumbuhan ekonomi berkeadilan adalah salah satu konsep yang diharapkan mampu mengantarkan Indonesia mencapai keberhasilan nasional di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antar satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah (Rubiarko, 2013).

Kebijakan yang telah diterapkan selama pemerintahan orde baru mengakibatkan kesenjangan atau ketidakmerataan (*disparity*)

ekonomi regional di Indonesia. Menurut undang-undang No 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam yang telah diambil oleh pemerintah pusat akan didistribusikan lagi ke daerah penghasil sumber daya alam tersebut.

Kenyataan yang terjadi adalah yang banyak menikmati hasil dari sumber daya tersebut adalah pemerintah pusat akibatnya daerah penghasil sumber daya alam yang telah diambil oleh pemerintah pusat tidak dapat menikmati hasilnya secara layak karena pembagian hasil yang tidak cukup besar dan proporsional tersebut. Faktor inilah yang diduga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan di dalam perekonomian regional yang bersifat akut.

Disparitas yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran ini diduga menjadi penyebab banyaknya wilayah-wilayah terpencil yang belum merdeka. Sejauh ini belum diketahui dengan pasti seberapa besar disparitas perekonomian antar provinsi di Indonesia.

Pemerintah yang membuat kebijakan ini masih sangat percaya bahwa pembangunan ekonomi yang dijalankan atas kebijakan ini dapat menghasilkan *Trickle Down Effect*. Kebijakan pemerintah yang dianggap dapat menghasilkan *Trickle Down Effect* pada masa pemerintahan orde baru ini mengalami kegagalan pembangunan ekonomi, bahkan menimbulkan disparitas ekonomi regional yang semakin besar serta kecemburuan sosial. Pesatnya perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini justru menimbulkan *Backwash Effect* yang pertumbuhan ekonominya hanya bisa dinikmati masyarakat yang kaya.

Kecemburuan sosial yang terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan pecahnya kesatuan NKRI yang disebabkan lemahnya pembangunan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi membaiknya pembangunan ekonomi juga melahirkan paradoks yakni masuknya ideologi baru yang tidak terbendung yang pada akhirnya ideologi tersebut menghilangkan identitas asli Indonesia sehingga berpotensi runtuhnya kesatuan NKRI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan persis disparitas yang terjadi dalam provinsi-provinsi di Indonesia dengan harapan perpecahan NKRI tidak terjadi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kontribusi ekonomi antar provinsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan absolut antar provinsi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui disparitas ekonomi antar provinsi di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Teori Schumpeter (1934) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah negara maju.

Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Menurut H. Saberan (2002;5) produk domestik regional bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah produk domestik regional bruto merupakan gabungan dari empat kata yaitu:

1. Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa.
2. Domestik, artinya pembangunan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor-faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan.
3. Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan.
4. Bruto, artinya perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah diatas, maka arti PDRB adalah seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu.

PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pendapatan domestik regional bruto dan pengeluaran domestik regional bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran.

PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pendapatan domestik regional bruto dan pengeluaran domestik regional bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran.

1. PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu: upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha.
2. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (Non Profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan modal bruto, selisih ekspor dan selisih persediaan barang (stok), (BPS, Pendapatan Regional Kabupaten Biora Tahun 2003;7)

Indikator Pengukuran Disparitas

Indikator yang dapat menunjukkan perubahan atau peningkatan di bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari perubahan besaran Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun ini maka didapatlah angka pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan perekonomian. Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat menggunakan berbagai macam pendekatan.

Beberapa diantaranya adalah menggunakan Teori Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil dan Perbandingan Absolut.

Indeks Williamson

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi: 1997:1).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu, Ardani (1992:3) mengemukakan bahwa kesenjangan/ ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) endominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyard, 1999: 129).

Indeks Entropy Theil

Theil's Coefficient of Concentration telah menjadi indeks yang sangat dengan indeks kesenjangan lainnya. Indeks Theil merupakan suatu analisa statis yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dengan menggunakan ukuran entropy dari ketidakmerataan (Etharina, 2005). Koefisien Theil dapat diinterpretasikan sebagai logaritma dari rata-rata geometri tertimbang dari pendapatan per kapita regional yang dideflasikan dengan rata-rata pendapatan per kapita nasional.

Lebih lanjut Wibisono (2003) menyatakan bahwa untuk pendapatan per kapita yang merata sempurna, indeks Theil diberikan bobot nilai nol. Indeks Theil mempunyai beberapa keunggulan yaitu: Pertama, sifatnya yang tidak sensitif terhadap skala daerah dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Kedua, indeks Theil independen terhadap jumlah daerah-daerah sehingga dapat digunakan sebagai pembanding disparitas dari sistem regional yang berbeda-beda. Ketiga, indeks Theil dapat didekomposisikan ke dalam indeks ketidakmerataan antar dan intra kelompok daerah menjadi disparitas between dan disparitas within wilayah kelompok atau grup secara simultan.

Menurut Wibisono (2003) dalam studi empirisnya menemukan bahwa karena sifatnya yang bisa didekomposisi maka indeks Theil memberikan tambahan informasi bahwa kesenjangan dalam pendapatan per kapita regional lebih banyak diserap oleh kesenjangan di dalam kelompok wilayah (*within inequality*) daripada kesenjangan antar kelompok wilayah (*between inequality*).

Perbandingan Absolut Antar Wilayah

Teori yang menjelaskan tentang perbandingan absolut antar daerah melalui pendekatan Tipologi Klassen (Klassen Typology). Pendekatan Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap wilayah (Bank Indonesia, 2006). Pendekatan Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan per kapita daerah. Pendekatan ini akan menghasilkan karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*).
2. Daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*).
3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*).
4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk tabel dan sebagainya).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah variabel-variabel yang akan digunakan dalam menganalisis data. Variabel-variabel yang akan digunakan adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi
Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah:
 - a. PDRB provinsi tahun ke t
 - b. PDRB provinsi tahun ke t-1
2. Kontribusi Ekonomi
Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah:
 - a. PDRB masing-masing Provinsi atas dasar harga berlaku.
 - b. Total PDRB antar Provinsi di Indonesia
3. Perbandingan Absolute Antar Provinsi (Tipologi Klassen)
Variabel yang digunakan dalam perhitungan perbandingan antar daerah adalah:
 - a. Rata-rata PDRB per kapita di Indonesia.
 - b. Rata-rata PDRB per kapita di antar Pulau di Indonesia.
 - c. Jumlah penduduk masing-masing Provinsi.
 - d. Jumlah penduduk Indonesia
4. Indeks Disparitas Perekonomian Antar Provinsi (Williamson)
Variabel yang digunakan dalam metode ini adalah:
 - a. Rata-rata PDRB perkapita menurut harga berlaku antar provinsi.
 - b. Rata-rata PDRB perkapita menurut harga konstan antar provinsi.
 - c. Jumlah penduduk antar Provinsi
5. Indeks Disparitas Perekonomian Antar Provinsi (Entropy)
Variabel yang digunakan dalam metode ini adalah:
 - a. PDRB provinsi menurut harga berlaku.
 - b. PDRB provinsi menurut harga konstan

Data yang diperlukan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan, antara lain data yang telah diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber lain yang relevan dan terkait dengan objek-objek penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan digunakan dalam perhitungan. Data yang diperlukan adalah:

- a. PDRB menurut harga berlaku menurut Provinsi tahun 2013-2017. PDRB menurut harga konstan menurut Provinsi tahun 2013-2017.
- b. PDRB perkapita harga berlaku menurut Provinsi tahun 2013-2017.
- c. PDRB perkapita harga konstan menurut Provinsi tahun 2013-2017.
- d. Data jumlah penduduk seluruh provinsi di Indonesia.

Metode Analisis

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menentukan berapa besar pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi, sehingga dapat diketahui provinsi yang memiliki pertumbuhan yang besar dan pertumbuhan yang rendah. Rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Ekonomi

Perhitungan kontribusi digunakan untuk menganalisis dan menentukan kontribusi masing-masing provinsi. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diidentifikasi kontribusi dari masing-masing provinsi, sehingga dapat diketahui provinsi yang memiliki kontribusi terbesar dan terendah dalam provinsi-provinsi di Indonesia. Rumus yang digunakan dalam perhitungan kontribusi ekonomi provinsi terhadap PDRB provinsi di Indonesia adalah:

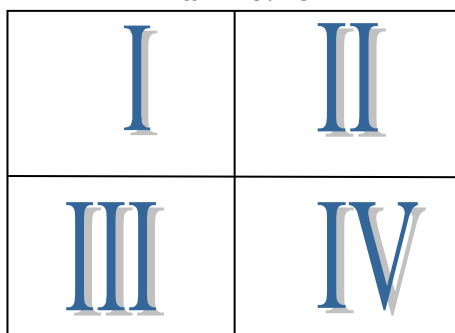
$$\text{Kontribusi ekonomi} = \frac{\text{PDRB provinsi}}{\text{PDRB total provinsi}} \times 100\%$$

3. Perbandingan Absolut Antar Provinsi (Tipologi Klassen)

Perbandingan absolut antar provinsi di sajikan dalam bentuk diagram empat kuadran. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Ditengah-tengah sumbu vertical dan sumbu horizontal digambarkan garis tegak lurus. Posisi masing-masing provinsi pada salah satu kuadran tergantung kepada nilainya jika dibandingkan nilai rata-rata Provinsi untuk PDRB perkapita dan tingkat pertumbuhan.

1. Kuadran I : ditempati oleh provinsi-provinsi dengan nilai PDRB perkapita lebih rendah tetapi tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.
2. Kuadran II : ditempati oleh provinsi-provinsi dengan nilai PDRB perkapita yang lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.
3. Kuadran III : ditempati oleh provinsi-provinsi dengan nilai PDRB perkapita yang tinggi tetapi tingkat pertumbuhan yang lebih rendah.
4. Kuadran IV : ditempati oleh provinsi-provinsi dengan nilai PDRB perkapita rendah dan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah.

GAMBAR 1
Bentuk Kuadran Perbandingan Absolut Antar Provinsi



Sumber : Peneliti

Apabila diagram empat kuadran tersebut disajikan secara berkala, maka akan diperoleh gambaran perubahan lokasi masing-masing provinsi dalam diagram yang sekaligus menunjukkan dinamika pembangunan antar wilayah. Misalnya apabila suatu provinsi berubah posisinya dari kuadran IV melompat keposisi kuadran II yang berarti daerah tersebut telah mencapai kemajuan relatif dibandingkan dengan wilayah lain dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bukan tidak

mungkin terjadi bahwa perubahan posisi dalam era otonomi menunjukkan dinamikan kemampuan daerah dalam hal membangun perekonomiannya.

Indeks Disparitas Perekonomian Antar Provinsi (Williamson)

Pengukuran indeks disparitas didasarkan kepada keragaman yang terjadi pada hasil-hasil pembangunan ekonomi antar provinsi. Dalam hal ini komponen yang dihitung berupa besaran PDRB perkapita dan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga perkapita. Nilainya menunjukkan kondisi kesenjangan antar wilayah yang disebabkan oleh dua indikator tersebut. kriteria pengukurannya semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin besar pula kesenjangan antar provinsi. Sebaliknya, semakin kecil nilai indikator ini menunjukkan pemerataan antar provinsi yang semakin baik. Untuk menghitung indeks disparitas digunakan metode koefisien variasi tertimbang yang dikemukakan oleh Williamson. Rumus yang digunakan adalah:

$$V_w = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{n_i}{n}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

CVW = Koefisien variasi tertimbang

$\bar{Y}$ = Rata-rata PDRB perkapita di Indonesia

Y_i = Rata-rata PDRB perkapita di Provinsi

n_i/n = Proporsi jumlah penduduk provinsi ke I terhadap jumlah penduduk Indonesia

Indeks Disparitas Perekonomian Antar Provinsi (Entropy)

Indeks Entropi digunakan untuk melihat hierarki wilayah, yaitu mengukur tingkat perkembangan suatu wilayah dan melihat sektor-sektor yang dominan (yang berkembang) pada wilayah tersebut. Data yang dianalisa adalah data PDRB provinsi. Analisis model entropy merupakan salah satu konsep analisis yang dapat menghitung tingkat keragaman komponen aktifitas. Prinsip pengertian indeks entropi ini adalah semakin beragam aktifitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka semakin tinggi entropi wilayah, artinya wilayah tersebut semakin berkembang (Indeks entropi tinggi = tingkat perkembangan juga tinggi).

Peneliti menyajikan identifikasi arah pergeseran ekonomi secara spasial dengan menggunakan indikator PDRB provinsi dengan dua pendekatan: a) pendekatan

perbandingan sederhana antara PDRB provinsi, dan b) menggunakan penghitungan indeks entropy. Dalam perumusan formal, indeks untuk mengukur kesenjangan di seluruh propinsi di Indonesia ditulis berikut ini:

$$I(y) = \sum_{r=1}^R Y_r \log \frac{Y_r}{N_r / N} + \sum_{r=1}^R Y_r \left[\sum_{i \in r} \frac{y_i}{Y_r} \log \frac{y_i / Y_r}{N_r / N} \right]$$

Dimana:

$I(y)$ = indeks entropi;

y_i = pangsa propinsi terhadap total PDRB Indonesia;

N = jumlah keseluruhan propinsi (26).

Y_r = pangsa seluruh propinsi dalam pulau;

N_r = jumlah propinsi dalam pulau r ; dan

R = jumlah pulau.

IV. PEMBAHASAN

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sumatera
Pertumbuhan Ekonomi pulau Sumatera tahun 2013-2017 tersaji pada tabel 5.1 berikut ini:

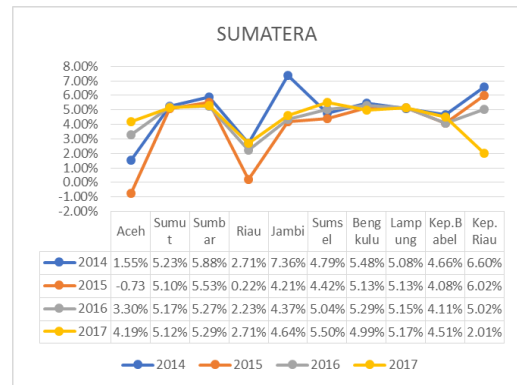
TABEL 1
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi/Pulau Sumatera Tahun 2014-2017

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Aceh	1.55%	-0.73%	3.30%	4.19%	2.08%
2	Sumut	5.23%	5.10%	5.17%	5.12%	5.16%
3	Sumbar	5.88%	5.53%	5.27%	5.29%	5.49%
4	Riau	2.71%	0.22%	2.23%	2.71%	1.97%
5	Jambi	7.36%	4.21%	4.37%	4.64%	5.14%
6	Sumsel	4.79%	4.42%	5.04%	5.50%	4.94%
7	Bengkulu	5.48%	5.13%	5.29%	4.99%	5.22%
8	Lampung	5.08%	5.13%	5.15%	5.17%	5.13%
9	Kep.Babel	4.66%	4.08%	4.11%	4.51%	4.34%
10	Kep. Riau	6.60%	6.02%	5.02%	2.01%	4.91%
Total PE		49.34%	39.12%	44.96%	44.13%	4.44%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Sumatera:

GRAFIK 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Sumatera Tahun 2014-2017



Sumber: data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik diatas terlihat jelas tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi/pulau sumatera yang selalu fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 49,34%, pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 39,12%, tahun 2016 mulai membaik sebesar 44,96%, dan tahun 2017 sedikit menurun kembali menjadi sebesar 44,13%. Laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 20.90%.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Jawa
Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

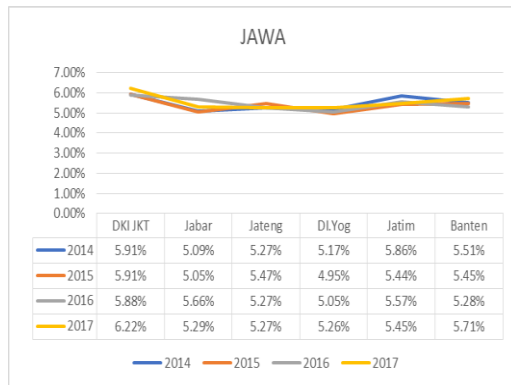
TABEL 2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Jawa

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	DKI JKT	5.91%	5.91%	5.88%	6.22%	5.98%
2	Jabar	5.09%	5.05%	5.66%	5.29%	5.27%
3	Jateng	5.27%	5.47%	5.27%	5.27%	5.32%
4	DI.Yog	5.17%	4.95%	5.05%	5.26%	5.11%
5	Jatim	5.86%	5.44%	5.57%	5.45%	5.58%
6	Banten	5.51%	5.45%	5.28%	5.71%	5.49%
Total PE		32.82%	32.26%	32.71%	33.19%	5.46%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi/Pulau Jawa:

GRAFIK 2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Jawa Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik diatas tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Jawa yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 32,82%, tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar 32,26%, tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup kecil sebesar 32,71%, dan tahun 2017 meningkat kembali sebesar 33,19%. Laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi di Provinsi Dki Jakarta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98%.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Nusa Tenggara Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel 5.3 berikut ini:

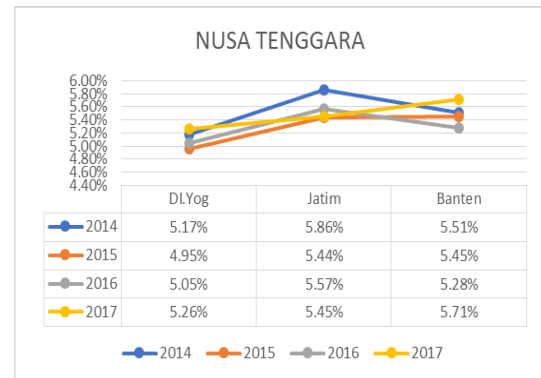
TABEL 3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Nusa Tenggara Tahun 2014-2017

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Bali	6.73%	6.03%	6.32%	5.59%	6.17%
2	NTB	5.17%	21.76%	5.82%	0.11%	8.22%
3	NTT	5.05%	4.92%	5.17%	5.16%	5.08%
Total PE		16.96%	32.71%	17.31%	10.87%	6.49%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi/Pulau Nusa Tenggara:

GRAFIK 3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi/Pulau Nusa Tenggara Tahun 2014-
2017



Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik diatas tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Nusa Tenggara yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Nusa Tenggara sebesar 16,96%, tahun 2015 meningkat tajam sebesar 32,71%, namun tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 17,31%, dan terus menurun di tahun 2017 sebesar 10,87%. Laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17%.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel 5.4 berikut ini:

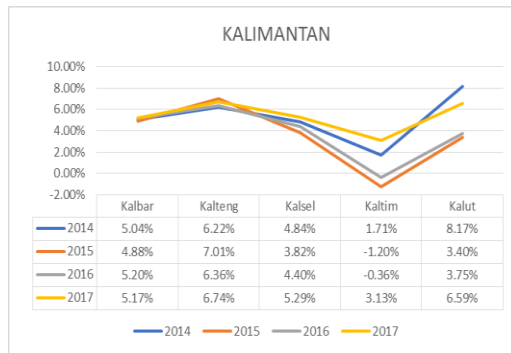
TABEL 4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kalimantan Tahun 2014-2017

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Kalbar	5.04%	4.88%	5.20%	5.17%	5.07%
2	Kalteng	6.22%	7.01%	6.36%	6.74%	6.58%
3	Kalsel	4.84%	3.82%	4.40%	5.29%	4.59%
4	Kaltim	1.71%	-1.20%	-0.36%	3.13%	0.82%
5	Kalut	8.17%	3.40%	3.75%	6.59%	5.48%
Total PE		25.97%	17.91%	19.35%	26.93%	4.51%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi/Pulau Kalimantan:

GRAFIK 4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi/Pulau Kalimantan Tahun 2014-
2017



Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik diatas tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Kalimantan yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan sebesar 25,97%, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 17,91%, tahun 2016 mulai sedikit membaik sebesar 19,35%, dan tahun 2017 meningkat kembali sebesar 26,93%. Laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 26,32%.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi
Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Sulawesi Tahun 2014-2017

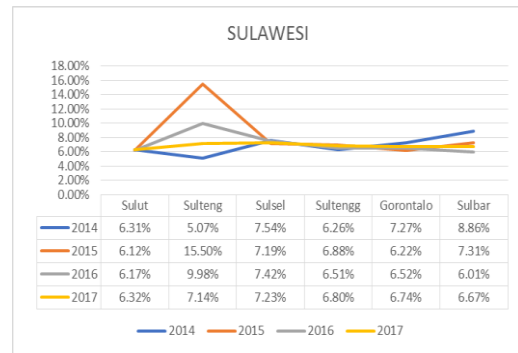
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Sulut	6.31%	6.12%	6.17%	6.32%	6.23%
2	Sulteng	5.07%	15.50%	9.98%	7.14%	9.42%
3	Sulsel	7.54%	7.19%	7.42%	7.23%	7.34%
4	Sultengg	6.26%	6.88%	6.51%	6.80%	6.62%
5	Gorontalo	7.27%	6.22%	6.52%	6.74%	6.69%
6	Sulbar	8.86%	7.31%	6.01%	6.67%	7.21%
Total PE		41.31%	49.22%	42.63%	40.91%	7.25%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi/Pulau Sulawesi:

GRAFIK 5

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Sulawesi Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik diatas tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Sumatera yang selalu fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini terlihat, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi sebesar 41,31%, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 49,22%, tahun 2016 menurun menjadi sebesar 42,63%, dan tahun 2017 kembali menurun menjadi sebesar 40,91%. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37,69%.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Maluku
Pertumbuhan Ekonomi Pulau Maluku Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel 5.6 berikut ini:

TABEL 6

Perkembangan Ekonomi Provinsi/Pulau Maluku Tahun 2014-2017

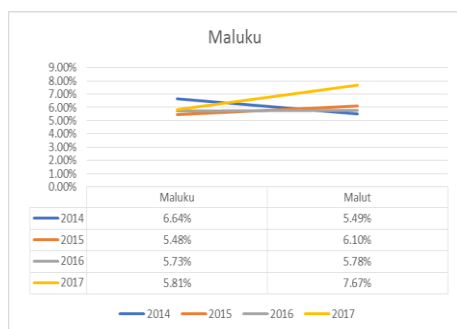
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Maluku	6.64%	5.48%	5.73%	5.81%	5.92%
2	Malut	5.49%	6.10%	5.78%	7.67%	6.26%
Total PE		12.13%	11.57%	11.51%	13.49%	6.09%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku:

GRAFIK 6

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Maluku Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Maluku cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku sebesar 12,13%, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 11,57%, tahun 2016 menurun kembali menjadi 11,51%, kemudian tahun 2017 mulai membaik dengan peningkatan sebesar 13,49%. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 25,04%.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Papua

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Papua Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel 5.7 berikut ini:

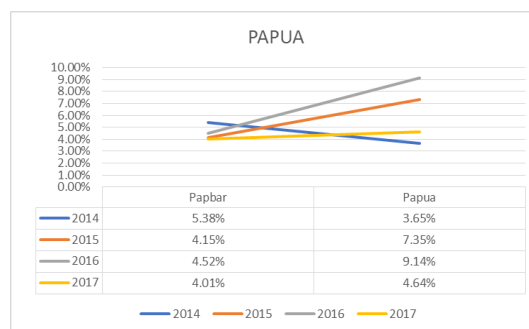
TABEL 7

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Papua Tahun 2014-2017

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Papbar	5.38%	4.15%	4.52%	4.01%	4.52%
2	Papua	3.65%	7.35%	9.14%	4.64%	6.19%
Total PE		9.03%	11.50%	13.66%	8.66%	5.36%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua:



Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi/Pulau Papua cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pulau Papua sebesar 9,03%, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 11,50%, tahun 2016 meningkat kembali menjadi 13,06%, kemudian tahun 2017 mulai memburuk dengan penurunan sebesar 8,66%.

Analisis Kontribusi Ekonomi Sumatera

Kontribusi ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL 8

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Sumatera Tahun 2014-2017

NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Aceh	1.26%	1.20%	1.11%	1.08%	1.16%
2	Sumut	4.89%	4.89%	4.91%	4.96%	4.91%
3	Sumbar	1.53%	1.54%	1.54%	1.55%	1.54%
4	Riau	6.32%	6.36%	5.60%	5.39%	5.92%
5	Jambi	1.35%	1.36%	1.33%	1.36%	1.35%
6	Sumsel	2.92%	2.87%	2.85%	2.80%	2.86%
7	Bengkulu	0.42%	0.42%	0.43%	0.44%	0.43%
8	Lampung	2.13%	2.16%	2.17%	2.21%	2.17%
9	Kep.Babel	0.52%	0.53%	0.52%	0.51%	0.52%
10	Kep. Riau	1.70%	1.69%	1.71%	1.71%	1.70%
Total KE		23.05%	23.02%	22.18%	22.02%	2.26%

Sumber : data BPS yang diolah

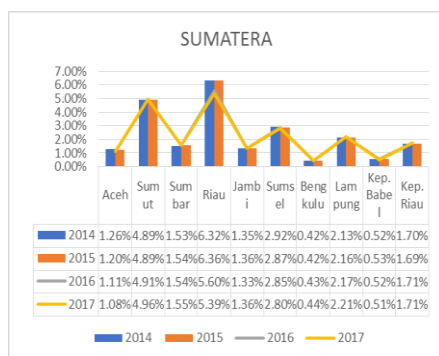
Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Sumatera:

GRAFIK 7

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Pulau Papua Tahun 2014-2017

DIAGRAM 1

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Sumatera Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah sekitar 22,02%. Kontribusi perekonomian Provinsi Sumatera terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar ke tiga setelah Pulau Kalimantan dan Jawa. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari provinsi Riau dengan rata-rata kontribusi mencapai 5,92%. Sementara itu kontribusi provinsi terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Bengkulu.

Analisis Kontribusi Ekonomi Jawa

Kontribusi ekonomi Pulau Jawa Tahun 2014-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL V.9

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Jawa Tahun 2014-2017

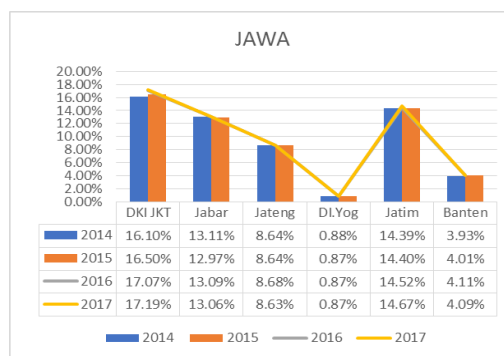
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	DKI JKT	16.10%	16.50%	17.07%	17.19%	16.72%
2	Jabar	13.11%	12.97%	13.09%	13.06%	13.06%
3	Jateng	8.64%	8.64%	8.68%	8.63%	8.65%
4	DI.Yog	0.88%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%
5	Jatim	14.39%	14.40%	14.52%	14.67%	14.49%
6	Banten	3.93%	4.01%	4.11%	4.09%	4.04%
Total KE		57.06%	57.39%	58.33%	58.52%	9.64%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Jawa:

DIAGRAM V.2

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Jawa Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah sekitar 58,52%. Kontribusi perekonomian Provinsi Jawa terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar ke dua setelah Pulau Kalimantan. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata kontribusi ekonomi mencapai 16,72%. Sementara itu kontribusi provinsi terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Yogyakarta

Analisis Kontribusi Ekonomi Nusa Tenggara

Kontribusi ekonomi Pulau Nusa Tenggara Tahun 2014-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL V.10

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Nusa Tenggara Tahun 2014-2017

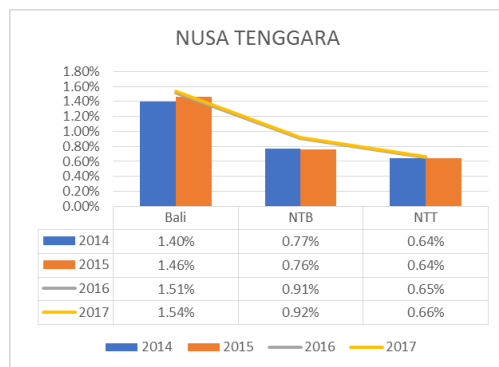
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Bali	1.40%	1.46%	1.51%	1.54%	1.48%
2	NTB	0.77%	0.76%	0.91%	0.92%	0.84%
3	NTT	0.64%	0.64%	0.65%	0.66%	0.65%
Total KE		2.80%	2.87%	3.07%	3.12%	0.99%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Nusa Tenggara:

DIAGRAM 3

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Nusa Tenggara Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah sekitar 3,12%. Kontribusi perekonomian wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar ke lima. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari provinsi Bali dengan kontribusi ekonomi mencapai 1,48%. Sementara itu kontribusi provinsi terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Analisis Kontribusi Ekonomi Kalimantan

Kontribusi ekonomi Pulau Kalimantan Tahun 2014-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL V.11

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Kalimantan Tahun 2014-2017

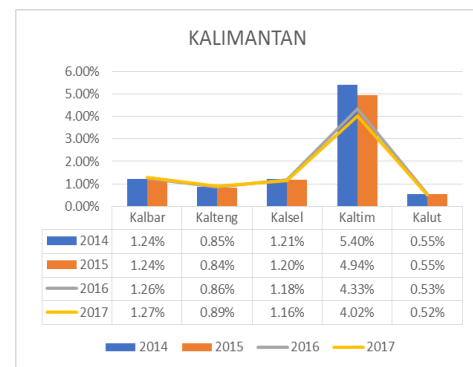
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Kalbar	1.24%	1.24%	1.26%	1.27%	1.25%
2	Kalteng	0.85%	0.84%	0.86%	0.89%	0.86%
3	Kalsel	1.21%	1.20%	1.18%	1.16%	1.18%
4	kaltim	5.40%	4.94%	4.33%	4.02%	4.67%
5	Kalut	0.55%	0.55%	0.53%	0.52%	0.54%
Total KE		9.24%	8.77%	8.15%	7.86%	1.70%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Kalimantan:

DIAGRAM 4

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Kalimantan Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Kalimantan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah mencapai 7,86%. Kontribusi perekonomian Provinsi Kalimantan terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar dari 7 Provinsi. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi ekonomi mencapai 4,67%. Sementara itu kontribusi provinsi terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Kalimantan Utara.

Analisis Kontribusi Ekonomi Sulawesi

Kontribusi ekonomi Pulau Sulawesi Tahun 2014-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL V.12

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Sulawesi Tahun 2014-2017

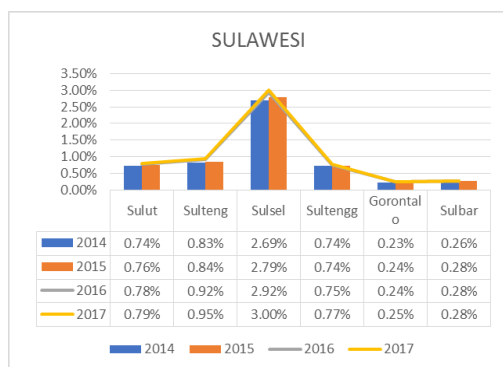
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Sulut	0.74%	0.76%	0.78%	0.79%	0.77%
2	Sulteng	0.83%	0.84%	0.92%	0.95%	0.89%
3	Sulsel	2.69%	2.79%	2.92%	3.00%	2.85%
4	Sultengg	0.74%	0.74%	0.75%	0.77%	0.75%
5	Gorontalo	0.23%	0.24%	0.24%	0.25%	0.24%
6	Sulbar	0.26%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%
Total KE		5.50%	5.64%	5.91%	6.04%	0.96%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Sulawesi:

DIAGRAM V.5

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Sulawesi Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah sekitar 6,04%. Kontribusi perekonomian Provinsi Sulawesi terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar ke empat. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi ekonomi mencapai 2,85%. Sementara itu kontribusi provinsi terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Gorontalo.

Analisis Kontribusi Ekonomi Maluku

Kontribusi ekonomi Pulau Maluku Tahun 2014-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL V.13

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Maluku Tahun 2014-2017

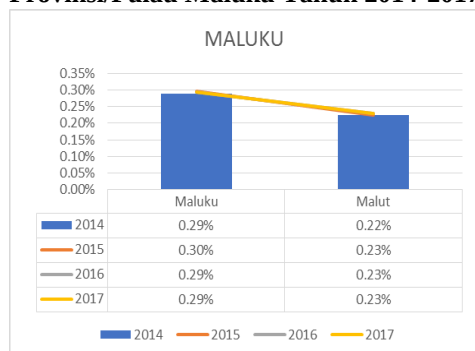
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Maluku	0.29%	0.30%	0.29%	0.29%	0.29%
2	Malut	0.22%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%
Total KE		0.51%	0.52%	0.52%	0.52%	0.26%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Maluku:

DIAGRAM V.6

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Maluku Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Maluku terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah sekitar 0,52%. Kontribusi perekonomian Provinsi Maluku terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terkecil dari 7 Provinsi lainnya. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari provinsi Maluku dengan kontribusi ekonomi mencapai 0,29%. Sementara itu kontribusi provinsi terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Maluku Utara.

Analisis Kontribusi Ekonomi Papua

Kontribusi ekonomi Pulau Papua Tahun 2014-2017 tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL V.14

Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Papua Tahun 2014-2017

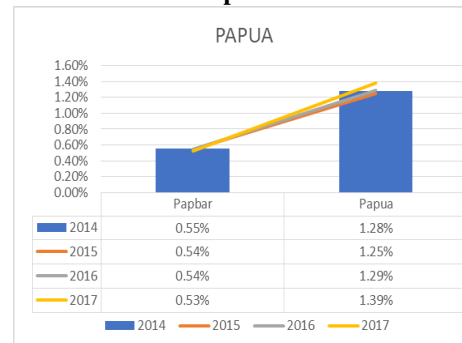
NO	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	RATAAN
1	Papbar	0.55%	0.54%	0.54%	0.53%	0.54%
2	Papua	1.28%	1.25%	1.29%	1.39%	1.30%
Total KE		1.83%	1.79%	1.83%	1.91%	0.92%

Sumber : data BPS yang diolah

Berikut ini diagram yang menunjukkan kontribusi ekonomi di Provinsi/Pulau Papua:

DIAGRAM V.7

Perkembangan Kontribusi Ekonomi Provinsi/Pulau Papua Tahun 2014-2017



Sumber : data BPS yang diolah

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Papua terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 adalah sekitar 1,91%. Kontribusi perekonomian Provinsi Papua terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar keenam. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terbesar terhadap perekonomian nasional berasal dari provinsi Papua dengan kontribusi ekonomi mencapai 1,30%. Sementara itu kontribusi provinsi

terendah terhadap perekonomian nasional berasal dari Provinsi Papua Barat.

Perbandingan Absolut Antar Provinsi

Pada tahun 2014 terdapat enam provinsi yang masuk dalam kuadran satu diantaranya ialah, Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur yang menunjukkan melemahnya pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut. Ke enam provinsi tersebut perlu meningkatkan pertumbuhannya agar bisa bergeser ke kuadran dua yang merupakan kuadran terbaik dengan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi yang diatas rata-rata.

Kuadran dua yang merupakan kuadran terbaik dengan PDRB dan Pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata hanya berisi Provinsi DKI Jakarta, dimana hal ini memperkuat indikasi bahwa pembangunan hanya di fokuskan ke pulau jawa saja.

Kuadran tiga merupakan kuadran dengan lemahnya PDRB namun pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini terdiri dari, Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Provinsi yang masuk dalam kuadran empat yang merupakan kuadran dengan PDRB dan Pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata diantaranya, Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pada tahun 2017 terdapat lima provinsi yang masuk dalam kuadran satu yang merupakan kuadran dengan PDRB diatas rata-rata tetapi memiliki Pertumbuhan ekonomi yang lemah. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini diantaranya ialah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi tersebut perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar dapat bergeser pada kuadran dua yang merupakan kuadran terbaik.

Provinsi yang masuk dalam kuadran dua yang memiliki PDRB dan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan.

Kuadran tiga merupakan kuadran dengan lemahnya PDRB namun memiliki

pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini terdiri dari Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Provinsi yang masuk dalam kuadran empat merupakan provinsi dengan PDRB dan Pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Babel, Kep. Riau, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua.

Analisis Disparitas Antar Provinsi (Williamson)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Williamson yang telah dilakukan dengan menggunakan koefisien variasi tertimbang diperoleh indeks disparitas williamson untuk PDRB perkapita atas dasar harga konstan seperti di sajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 15
Indeks Diparitas Williamson Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017

TAHUN	CVW
2013	0.7235
2014	0.7311
2015	0,7401
2016	0.7386
2017	0.7503

Sumber : data BPS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa disparitas (Williamson) di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,7235, tahun 2014 sebesar 0,7311, tahun 2015 sebesar 0,7401, tahun 2016 sebesar 0,7386, dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 0,7503. Merujuk pada tabel diatas menunjukkan bahwa disparitas pendapatan ekonomi yang terjadi antar Provinsi di Indonesia sangatlah tinggi selama periode 2013-2017. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan hasil analisis Indeks disparitas Williamson dengan menggunakan data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2013-2017 juga semakin besar.

Analisis Disparitas Antar Provinsi (Entropy)

Selain menggunakan indeks Williamson untuk mengetahui kesenjangan antar provinsi perhitungan juga dilakukan menggunakan Indeks Entrophy dan diperoleh indeks disparitas untuk PDRB atas dasar harga berlaku 2010 seperti di sajikan pada tabel 5.19 berikut:

TABEL V.26
Indeks Disparitas Entrophy Theil Antar
Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017

TAHUN	ENTROPHY
2013	0.81
2014	0.80
2015	0.80
2016	0.80
2017	0.81

Sumber: data BPS yang diolah

Dari hasil analisa yang didapatkan nilai Indeks Entrophy Theil periode tahun 2013-2014, rata-rata ketimpangan sebesar 0,80. Hasilnya bahkan lebih besar dibandingkan analisis Williamson. Secara umum indeks entrophy di Indonesia selama periode 2013-2017 cenderung stagnan yang hanya berada pada level 0,80-0,81 dan relatif tidak adanya pergerakan. Hal ini mengidentifikasi bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung tidak memiliki perubahan karna stagnan dan sama sekali tidak ada pergerakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, sebagaimana disparitas perekonomian antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Rata-rata Pertumbuhan ekonomi pada Pulau Sumatera selama periode 2014-2017 sebesar 4,44%. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selama periode 2014-2017 sebesar 5,46%. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pulau Nusa Tenggara selama periode 2013-2017 sebesar 6,49%. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan selama periode 2013-2017 sebesar 4,51%. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi selama periode 2013-2017 sebesar 7,25%. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku selama periode 2013-2017 sebesar 6,09%. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pulau Papua selama periode 2013-2017 sebesar 5,36%. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing pulau besar di Indonesia memiliki

pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif setiap tahunnya dan tingkat kesenjangan yang cukup besar.

- Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Sumatera selama periode 2013-2017 sebesar 2,26%. Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Jawa selama periode 2013-2017 sebesar 9,64%. Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Nusa Tenggara selama periode 2013-2017 sebesar 0,99%. Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Kalimantan selama periode 2013-2017 sebesar 1,70%. Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Sulawesi selama periode 2013-2017 sebesar 0,96%. Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Maluku selama periode 2013-2017 sebesar 0,26%. Rata-rata Kontribusi ekonomi pada Pulau Papua selama periode 2013-2017 sebesar 0,92%. Kontribusi ekonomi pada masing-masing provinsi memiliki tingkat kontribusi yang berbeda setiap tahunnya. Berdasarkan rata-rata kontribusi antar pulau besar di Indonesia tersebut membuktikan adanya disparitas perekonomian dan belum meratanya pembangunan yang terjadi antar provinsi cukup besar.
- Perbandingan absolut antar provinsi di Indonesia menunjukkan adanya perpindahan kuadran antara tahun 2014 dan tahun 2017 pada beberapa provinsi di Indonesia. Perpindahan terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Kep. Riau pada Pulau Sumatera. Pada Pulau Jawa perpindahan terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Banten. Pada Pulau Sulawesi perpindahan terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dan perpindahan terjadi di provinsi Maluku Utara pada Pulau Maluku. Perpindahan tersebut ada yang mengarah ke kuadran yang baik ada juga yang mengarah ke kuadran yang kurang baik. Perpindahan kuadran yang baik terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan yang berpindah dari kuadran IV ke kuadran II, Provinsi Banten yang berpindah dari kuadran I ke kuadran II, dan Provinsi Sulawesi Selatan yang berpindah dari kuadran III ke kuadran II.
- Disparitas perekonomian antar provinsi (Williamson) di Indonesia cukup besar. Indeks disparitas dengan perhitungan analisis menggunakan Williamson menunjukkan keadaan yang berfluktuatif dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan indeks kisaran dari 0,7235 pada tahun 2013 sampai dengan 0,7503 tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan yang cukup besar dan terus bertambah selama periode

2013 sampai dengan 2017 karena hampir mendekati angka satu sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pemerataan ekonomi yang belum merata dan adanya disparitas perekonomian antar provinsi.

- e. Disparitas perekonomian antar provinsi (Entropy) di Indonesia cukup besar. Indeks disparitas dengan perhitungan analisis menggunakan Entropy Theil menunjukkan rata-rata tingkat disparitas yang terjadi di Indonesia sebesar 0,80 dan cenderung tidak ada pergerakan sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian di Indonesia cenderung stagnan dan tidak ada perubahan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Saran

Pada bagian terakhir ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah. Adapun saran-saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi ekonomi antar provinsi di Indonesia menunjukkan kondisi kesenjangan yang besar. Oleh karena itu, pemerintah seluruh provinsi haruslah saling menopang pembangunan ekonomi antar provinsi sehingga tingkat disparitas antar wilayah menurun dan tidak ada lagi hanya satu provinsi yang unggul dan menjadi kekuatan ekonomi.
- b. Disparitas ekonomi yang terjadi antar provinsi mengakibatkan ketidakmerataan ekonomi antar wilayah yang akhirnya pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuatif dan tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan aksestabilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui sarana dan prasarana transportasi dalam mengatasi kesenjangan dan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi tersebut.
- c. Disparitas yang terjadi antar provinsi di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap PDRB provinsi sehingga pemerintah memiliki tugas besar dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antar provinsi dan pulau di Indonesia yaitu dengan cara memfasilitasi dan membangun wilayah-wilayah untuk menopang perekonomian bagi wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya rendah khususnya pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DI Yogyakarta, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua dan Papua Barat.

- d. Untuk mengatasi besarnya disparitas yang terjadi antar provinsi/pulau di Indonesia dibutuhkan beberapa strategi yang baik, antara lain:

1. Dalam bidang infrastruktur yaitu perbaikan transportasi dan konektivitas antar provinsi/pulau di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi harus dapat ditingkatkan.
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa.
3. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan yang ada di kepulauan terluar, dan daerah tertinggal agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam.
4. Mengembangkan perekonomian di daerah tertinggal.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah daerah tertinggal.
6. Mempercepat pemenuhan standar minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal.
7. Memberikan tunjangan khusus bagi daerah tertinggal misalnya memberikan tunjangan khusus pada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan pertanian serta pendampingan desa di daerah tertinggal.
8. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian inisiatif kepada swasta untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah tertinggal.
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, kawasan yang terisolir seperti daerah tertinggal misalnya di daerah tengah pengunungan.
10. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan di daerah tertinggal.
11. Mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardani, Amirudin. 1992, "Analysis of Regional Growth and Disparity: the Impact Analysis of The Project on Indonesian Development", Ph.D. Dissertation City and Regional

- Planning, University of Pennsylvania Philadelphia, USA (tidak dipublikasikan).
2. Arsyad, Lincoln. 1999. "Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
 3. Badan Pusat Statistik. 2004. "Pendapatan Kabupaten Biora 2003; 7 dan 11". Badan Pusat Statistik: Biora.
 4. Badan Pusat Statistik. 2018. "Statistik Indonesia 2018". Badan Pusat Statistik Indonesia: CV Dharmaputra.
 5. Badan Pusat Statistik. 2018. "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017". Badan Pusat Statistik Indonesia: CV Josevindo.
 6. Etharina. "Disparitas Pendapatan Antar daerah di Indonesia". Jurnal Kebijakan Ekonomi, Agustus 2005, I(1), hal.59-74.
 7. Myrdal, G. 1957. "Economic Theory and Underdevelopment Regions". London.
 8. Saberhan, H. 2002. Produk Domestik Regional Bruto. Rajawali: Jakarta.
 9. Schumpeter J. 1934. "The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle". Harvard University.
 10. Tarigan, R. 2004. "Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi". PT. Bumi Aksara: Jakarta.
 11. Todaro, Michael P. 2000. "Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga (terjemahan) Edisi Ketujuh Jilid 1". Erlangga: Jakarta.
 12. Wibisono, Yusuf. "Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Januari 2003, Vol.51, hal.53-82.